

KONFLIK SOSIAL DAN PROGRAM KESERASIAN SOSIAL

Oleh:

Nunung Hastika Ardiwijadja

email: nununghastika21@gmail.com

Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok yang ada, dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Pendekatan intervensi sosial dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial terhadap konflik Sosial melalui beberapa kebijakan program pemerintah yang mengatur penanganan konflik sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah Undang-Undang anti militansi dan anarkis, untuk mengatur masyarakat dalam waktu singkat. Untuk membangun budaya demokrasi dan budaya rasional jangka panjang dari generasi ke generasi, perlu diberikan di sekolah-sekolah Kurikulum budaya rasional dan demokrasi, mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, suatu program khusus baik teoritis maupun praktek atau contoh-contoh pelaksanaannya. Program keserasian sosial merupakan salah satu implementasi Kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di dalam masyarakat hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan "*community based social disaster risk management*". Program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentiment sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan. Bentuk kegiatan keserasian sosial dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh persaudaraan yang saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal-usul dan lain yang dilandasi semangat saling menghargai. Tindakan preventif ini bisa diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda aksi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Program Keserasian Sosial, Intervensi Sosial.

ABSTRACT

Conflict can be an instrumental process in the formation, unification and maintenance of social structures. Conflict can place and keep the line between two or more groups. Conflict with other groups can reinforce the identity of the existing group, and protect it from melting into the surrounding social world. The Social Intervention Approach in Social Welfare Science to Social Conflict through several Government Program Policies that govern the handling of social conflicts, either directly or indirectly. They are anti-militant and anarchist laws, to organize society in a short time. To build a culture of long-term rational democracy and culture from generation to generation, it is necessary to be provided in schools Rational and democratic cultural curricula, from the foundation to higher education, a special program both theoretical and practical or examples of its implementation. Social Harmony Program is one of the implementation of Ministry of Social RI Policy in handling conflict. Social harmony program is an effort to prevent the potential for conflict in the society of social relations between citizens, in harmony and full of peace. Social harmony program is an effort to prevent potential conflict in society, through approach "community based social disaster risk management". The program can realize harmonious social life order based on the basic values of togetherness, tolerance, mutual respect and respect, so as to build, establish and develop and maintain the common life among the people in the location of residence, in true brotherhood, togetherness, sentiment social with a sense of shared destiny and mutual loyalty to each other, social solidarity such as cohesion and solidarity. The form of social harmony activities can be physical and non-physical activities by involving elements of society. Activities begin from planning, execution, utilization and supervision to create a harmonious and fraternal life that mutual respect between members and community and without differentiating class, origin and other based on the spirit of mutual respect. Preventive action can be realized by carrying out a peace action through an action agenda of activities aimed at creating cohesiveness of groups within the community.

Keywords: *Social Conflict, Social Harmony Program, Social Intervention.*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, yang melakukan interaksi dengan masyarakat pasti pernah mengalami suatu pertentangan atau perbedaan dengan orang lain, baik perbedaan pendapat, ide, persepsi maupun kepentingan.

Pertentangan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah konflik. Konflik tersebut jika dibiarkan akan menjadi suatu masalah yang sangat besar. Konflik merupakan suatu proses sosial antara satu orang atau lebih, dimana salah seorang diantaranya berusaha menyingkirkan pihak lain, seperti yang dikatakan oleh Karl Marx (2010), bahwa masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Kalau kita cermati dari ungkapan tersebut maka manusia sebagai masyarakat tidak bisa menghindari adanya konflik dalam kehidupan.

Akhir-akhir ini konflik sosial di Indonesia semakin marak. Masyarakat menjadi begitu mudah tersulut rasa amarah dan diprovokasi oleh pihak lain. Konflik sosial yang terjadi seringkali disertai dengan kekerasan. Konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat merupakan salah satu penyebab luntarnya Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat, terkisnnya kearifan lokal, institusi pendidikan yang tidak mengajarkan visi

dunia pendidikan serta tidak maksimalnya Negara dalam melindungi hak konstitusional warga Negara. Dampak akibat konflik sosial dirasakan sangat mengganggu Indonesia sebagai negara demokrasi.

Menilik data yang diperoleh dari laman Kesbangpol-Kementerian Dalam Negeri, konflik sosial yang terjadi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan isu/pola konflik, sumber konflik, dan wilayah konflik. Pada rentang waktu 2013-2015 (pertengahan kuartal Januari s/d April) telah terjadi total 201 kasus dengan rincian sebagai berikut: eksek politik total berjumlah 15 kasus, bentrok antar warga total berjumlah 85 kasus, isu keamanan total berjumlah 45 kasus, isu SARA total berjumlah 10 kasus, konflik kesenjangan sosial total berjumlah 2 kasus, konflik pada institusi pendidikan total berjumlah 3 kasus, konflik ORMAS total berjumlah 10 kasus, dan sengketa lahan total berjumlah 31 kasus.

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Salah satu program yang menangani konflik sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya adalah Program Keserasian Sosial. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan pengembangan sosial berbasis masyarakat, diharapkan dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di dalam masyarakat, hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan "*community based sosial disaster risk management*". Diharapkan Program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal,

dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

Menurut Pandangan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang memiliki keluasan *settingnya* dalam ruang lingkup praktek, dalam rangka melaksanakan kegiatan intervensinya paling tidak ada tujuh tahap kegiatan Intervensi dalam menangani konflik sosial dengan komunitas atau masyarakat, yaitu: *Assessment*, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Terminasi. Itu semua dikaji melalui bagaimana intervensi pekerja sosial dilakukan dalam menangani konflik sosial tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Konflik

1.1 Pengertian Konflik

Sebelum lebih jauh berbicara tentang konflik ada baiknya diketahui dulu arti konflik. Beberapa ahli memberikan definisi tentang konflik dari sudut pandang masing-masing. Berikut ini adalah pendapat mereka tentang pengertian konflik.

1. Menurut Lacey (2003), Konflik sebagai "*a fight, a collision, a struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental strife, agony*" suatu pertarungan

benturan, pergulatan, pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan mental, penderitaan batin". Konflik memang melekat erat dalam dinamika kehidupan, sehingga manusia dituntut selalu berjuang dengan konflik.

2. Robert M.Z. Lawang (2008), menurut Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya.
3. Ariyono Suyono (2010), menurut Ariyono Suyono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.
4. Soerjono Soekanto (2010), menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok

yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

1.2 Asumsi dasar Teori Konflik

Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antithesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik

kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik. Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
- b. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam

masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Coser mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap masyarakat Yahudi bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil konflik *in-group* merupakan indikator adanya suatu hubungan yang sehat. Coser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan.

Asumsi dasar teori konflik adalah memandang bahwa realitas sosial setiap

masyarakat selalu berada dalam keadaan konflik yang tidak terelakan. Menurut para penganut teori konflik, masyarakat senantiasa dinamis. Dalam hal ini yang berbeda adalah penyebab konflik, intensitasnya dan dampak yang ditimbulkannya.

1.3 Faktor - Faktor Penyebab Konflik

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan

perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah

menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi secara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

1.4 Intervensi Sosial dan Program Keresasian Sosial

1.4.1 Intervensi Sosial

a. Pengertian

Intervensi sosial dapat diartikan sebagai sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya.

b. Tujuan dari Intervensi

Tujuan utama dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi

sosial orang (individu, kelompok, masyarakat) yang merupakan sasaran perubahan. Ketika fungsi sosial seseorang berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahtera akan semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar. Melalui intervensi sosial, hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupaya memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi riil klien.

c. Fungsi Intervensi

Fungsi dilakukannya intervensi dalam pekerjaan sosial, diantaranya:

- Mencari penyelesaian dari kelayan masalah secara langsung yang tentunya dengan metode-metode pekerjaan sosial.
- Menghubungkan kelayan dengan sistem sumber.
- Membantu kelayan menghadapi masalahnya.
- Menggali potensi dari dalam diri kelayan sehingga bisa membantunya untuk menyelesaikan masalahnya.

d. Prinsip Intervensi.

Beberapa prinsip dari pekerjaan sosial dalam melaksanakan praktek pertolongan, diantaranya:

- Memberikan pelayanan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat lansia.
- Melaksanakan hak asasi lansia.
- Memberikan pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan sesungguhnya.
- Mengupayakan kehidupan lansia lebih bermakna bagi diri, keluarga dan masyarakat.
- Menciptakan suasana kehidupan dalam panti yang bersifat kekeluargaan. Memberikan kesempatan kepada lansia untuk mendapatkan hak menentukan pilihan bagi dirinya sendiri.
- Menjamin terlaksananya pelayanan bagi lansia yang disesuaikan dengan perkembangan pelayanan lansia secara terus menerus dan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- Menerapkan pendekatan antar disiplin dan profesi.
- Memasyarakatkan informasi tentang aksesibilitas bagi lansia.

1.4.2 Program Keserasian Sosial

Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan Kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usulnya dan lainnya.

Hakekat keserasian sosial adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*livehood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan, dan solidaritas).

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan pengembangan sosial berbasis masyarakat, diharapkan dengan program

tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Program keserasian sosial merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik. Keserasian sosial merupakan kondisi dinamis yang menjamin terciptanya program keserasian sosial. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di dalam masyarakat hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan “*community based sosial disaster risk management*”. Diharapkan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Metode Kualitatif, dengan mendeskripsikan bagaimana Pekerja Sosial melakukan intervensi sosial pada masalah konflik sosial dalam masyarakat atau komunitas melalui Program Keserasian Sosial. Dengan menggunakan studi literatur penulis mencoba mendeskripsikan salah satu contoh kasus pelaksanaan Program Keserasian Sosial dalam menangani konflik sosial di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi secara sekunder yaitu data diambil dari berbagai literatur termasuk Buku Pedoman Program Keserasian Sosial, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Kemudian dianalisis dan dijadikan sebuah tulisan berupa makalah.

Intervensi Sosial Dalam Konflik Sosial Melalui Program Keserasian Sosial (Contoh Kasus Konflik Di Dki Jakarta)

1. Pemahaman Masalah (*Assessment*)

Sesuai dengan peran dan fungsi Kesejahteraan sosial maka dalam penanganan konflikpun kita berpedoman pada apa yang telah kita ketahui bersama mengenai pola intervensi kesejahteraan sosial. Ada beberapa kondisi yang bisa diperhatikan sebagai berikut:

- a. Bersaing tegas, dan tidak kooperatif, yaitu suatu hasrat untuk memuaskan kepentingan seseorang, tidak peduli dampaknya terhadap orang lain.
- b. Berkolaborasi, bila pihak-pihak yang berkonflik masing-masing berhasrat untuk memenuhi sepenuhnya kepentingan dari semua pihak, kooperatif dan pencarian solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.
- c. Menghindar
- d. Mengakomodasi
- e. Berkompromi

Perilaku mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat untuk menghancurkan pihak lain, serangan fisik yang agresif ancaman dan ultimatum, serangan verbal yang tegas, pertanyaan atau tantangan terang-terangan terhadap pihak lain, Ketidaksepakatan atau salah paham kecil. Hasil yang diharapkan dari program keserasian sosial adalah jalinan aksi-aksi antara pihak-pihak yang berkonflik akan menghasilkan konsekuensi. Hasilnya berfungsi dalam arti konflik menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsi dalam arti merintangi kinerja kelompok oleh pihak-pihak yang berkonflik, perilakunya meliputi, upaya terang-terangan untuk menghancurkan pihak lain, serangan fisik yang agresif, ancaman atau ultimatum, serangan verbal yang tegas, ancaman yang terang-terangan kepada pihak lain dan ketidakpastian atau ketidaksepakatan atau

kesalahpahaman kecil. Hasilnya adalah jalinan aksi-aksi kecil antara pihak-pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi hasil dalam arti konflik menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsi dalam arti menghalangi kinerja kelompok. Konflik sosial bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan golongan, dengan suatu pertentangan yang bisa dijadikan ukuran untuk melakukan suatu pemberontakan, maka konflik tersebut tidak bias dihindari lagi. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
- b. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
- c. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll.
- d. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
- e. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

1.2 Rencana Intervensi

Berikut ini solusi penyelesaian konflik, yang dapat ditawarkan untuk meminimalisir terjadinya konflik:

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

- b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
- c. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- d. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

1.3 Pola Penyelesaian Konflik

Konflik yang berkepanjangan selalu menyisakan ironi dan tragedi kekerasan yang terjadi dalam rentan waktu lama menjadikannya sebagai perilaku yang seolah wajar dan bahkan terlembagakan. Akibatnya lingkaran setan kekerasan menjadi mata rantai yang semakin sulit untuk diputuskan karena perasaan masing-masing pihak adalah korban, maka akan memicu dendam dan jika ada kesempatan akan dibalaskan. Belum lagi kerusakan dan kerugian harta benda yang harus ditanggung. Dampak konflik lainnya sanak keluarga juga turut terlibat.

Pada masyarakat multikultural, suatu konflik bisa diatasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Sikap tidak diskriminatif
- b. Rasional
- c. Persaingan yang sehat
- d. Dialogis (pertemuan tatap muka)
- e. Menciptakan suatu tujuan bersama yang tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dari masing-masing pihak yang berkonflik.
- f. Menghindar atau berusaha menarik diri dari konflik, misalnya mengurangi kesempatan untuk bertemu.
- g. Berusaha untuk menekan arti perbedaan sementara menekankan kepentingan bersama antara pihak-pihak yang berkonflik
- h. Melakukan tindakan kompromi dengan cara setiap pihak yang berkonflik melepaskan atau mengorbankan sesuatu yang berharga.
- i. Menggunakan teknik perubahan perilaku manusia, dengan cara memberikan bekal kepada pihak-pihak yang berkonflik tentang hubungan manusia yang baik dan mempelajari perilaku yang menyebabkan konflik.

Pola penyelesaian konflik bila dipandang dari sudut menang kalah pada masing-masing pihak, maka ada empat bentuk pengelolaan konflik, yaitu sebagai berikut:

- a. Bentuk kalah–kalah (menghindari konflik).
- b. Bentuk menang–kalah (persaingan).
- c. Bentuk kalah–menang (mengakomodasi).
- d. Bentuk menang–menang (kolaborasi).

1.4 Pendekatan Intervensi Kesejahteraan Sosial terhadap konflik Sosial melalui kebijakan Program Keserasian Sosial

Beberapa kebijakan program Pemerintah yang mengatur penanganan konflik sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah Undang-Undang anti militansi dan anarkis, untuk mengatur masyarakat dalam waktu singkat. Untuk membangun budaya demokrasi dan budaya rasional jangka panjang dari generasi ke generasi, perlu diberikan di sekolah-sekolah kurikulum budaya rasional dan demokrasi, mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, suatu program khusus baik teoritis maupun praktek atau contoh-contoh pelaksanaan. Segera menetapkan rancangan Undang-Undang Penanganan konflik sosial menjadi Undang-Undang,

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung

dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan Kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Begitu beragamnya sumber konflik sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik, terjadinya konflik secara umum disebabkan karena tiga faktor, yaitu motif sosial, motif ekonomi dan motif politik.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali, maka perlu penanganan terhadap konflik sosial secara profesional, sistematis, dan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan mulai pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik sosial, hingga pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak yang ditimbulkan.

Penanggulangan bencana sosial pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh dengan membangun partisipasi kearifan lokal untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan masalah konflik, Direktorat bantuan sosial korban bencana sosial menginisiasi program keserasian sosial dengan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial nomor 09/SK/BS.04.I/2012, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan Bencana, dirumuskan sesuai dengan karakteristik konflik, menyatukan, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai ketentuan penanganan konflik.

Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usulnya dan lainnya. Hakekat keserasian sosial adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*livehood*) diantara masyarakat di lokasi tempat

tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brotherhood*), kebersamaan (*togetherness*), sentimen sosial (senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan, dan Solidaritas).

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan pengembangan sosial berbasis masyarakat, diharapkan dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

Program keserasian sosial merupakan salah satu implementasi Kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik. Keserasian sosial merupakan kondisi dinamis yang menjamin terciptanya. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di dalam masyarakat hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan "*community based sosial disaster risk management*". Diharapkan Program tersebut dapat

mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

Bentuk kegiatan keserasian sosial dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh persaudaraan yang saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal-usul dan lain yang dilandasi semangat saling menghargai. Tindakan preventif ini bisa diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda aksi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat.

Dalam pedoman program keserasian sosial disebutkan tiga macam bentuk kegiatan yaitu:

a. Bentuk fisik meliputi:

- Pembuatan/Rehabilitasi sarana jalan kampung yang bukan sasaran kegiatan PU.
- Rehabilitasi sarana ibadah.
- Pembuatan tanggul/talud /gotong royong.
- Pembangunan balai pertemuan rakyat (Gedung serbaguna keserasian sosial)
- Pembuatan lapangan olah raga (tidak untuk pembelian tanah).
- Rehabilitasi saluran air lingkungan.
- Pengadaan sarana air bersih (MCK, sumur umum, pipanisasi).
- Pembuatan keranda dan tempat persemayaman
- Pembuatan sarana penerangan lingkungan
- Pembuatan tugu keserasian sosial.

b. Bentuk non fisik meliputi:

Suatu kegiatan aksi bersama (kerja bakti, upacara ritual, keagamaan dan budaya) yang dilaksanakan dalam bentuk padar karya dengan dana maksimal Rp 2.000.000,- selama enam bulan.

c. Kegiatan penunjang.

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang melekat pada bidang tugas pelaksanaan dilapangan digunakan untuk operasional forum keserasian sosial sebesar Rp.5.000.000,-

Mekanisme pelaksanaan keserasian sosial meliputi seleksi, pemantapan petugas/koordinasi, pemantapan tenaga pendamping sosial, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan, mekanisme penyaluran bantuan, tugas dan tanggungjawab.

2. Pelaksanaan Intervensi sosial pada Konflik Sosial melalui Program Keserasian Sosial

Satu diantara sekian banyak penanganan konflik yang dilakukan kementerian RI yaitu program keserasian sosial. Asumsinya program keserasian sosial merupakan modal sosial masyarakat untuk melahirkan konsensus sosial di masyarakat dalam menjawab hal-hal yang bertendensi pada bencana sosial. Diharapkan melalui program keserasian sosial mampu meningkatkan strategi adaptasi melalui kegiatan gotong royong, meningkatkan frekuensi pertemuan antar kelompok dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kerekatan sosial. Keserasian sosial dipahami sebagai langkah respon seimbang dari perilaku sosial dalam berinteraksi sesama komunitas dan bagian upaya mendalam dalam pemahaman tentang keberagaman. Dimensi yang diperlukan dalam menciptakan keserasian sosial adalah kemampuan beradaptasi dalam menjalin hubungan dalam masyarakat, melahirkan

kepatutan sosial sehingga tidak mengganggu kepentingan-kepentingan lain.

Hasil temuan lapangan di DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2010, Kecamatan Johor Baru menerima bantuan stimulan sebesar Rp.120.000.000/kelurahan. Selanjutnya dibentuklah forum keserasian sosial di masing-masing kelurahan dengan melibatkan potensi sosial masyarakat. Potensi sosial yang ada di Kecamatan Johor Baru meliputi: tokoh masyarakat, tokoh agama, orang peduli, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Taruna siaga Bencana, pekerja sosial masyarakat, forum keserasian sosial, forum kewaspadaan dini masyarakat, kelompok kesadaran masyarakat, forum anti kekerasan dan tawuran dan komunikasi kampung aman.

Implementasi program keserasian sosial di DKI Jakarta sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan keserasian sosial tahun 2010 dan 2011 meliputi: pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga penghijauan, perbaikan sarana olah raga, alat musik dan pembuatan tugu.

Lokasi pembuatan tugu perdamaian letaknya diantara kedua wilayah terjadinya bentrokan warga. Dalam rangka mensukseskan program

keserasian sosial pemerintah juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik, kesejahteraan rakyat, kepolisian dan TNI melakukan kegiatan sosialisasi, *outbond*, dan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dilakukan pelatihan menjahit, sablon, service AC dan HP.

Hasil diskusi kelompok dan observasi menunjukkan bahwa meskipun telah diadakan kesepakatan damai antar pelaku konflik dengan mendirikan tugu perdamaian, namun dalam kenyataannya konflik dan bentrok masih tetap terjadi hingga hari ini. Artinya forum keserasian sosial belum mampu menjangkau ke daerah konflik dan belum mampu menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. Hal ini terjadi karena forum keserasian sosial belum menyentuh akar permasalahannya.

Apabila dicermati lebih mendalam, sumber permasalahan konflik di Jakarta Pusat adalah: banyaknya pengangguran (sebagian besar penghuni bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga mereka memiliki peluang untuk berkumpul, minum minuman keras dll), lingkungan kumuh (padat penduduk, rumah petak dihuni oleh beberapa keluarga tidak ada ventilasi dan kamar khusus), pendidikan rata-rata cukup rendah.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik memiliki konsep yang sama dalam penanganan konflik berbasis masyarakat dalam upaya mencari formulasi penyelesaian konflik sosial. Masalahnya sampai dengan saat ini, penerapan kedua konsep tersebut menghadapi beberapa kendala.

Program keserasian sosial pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial, penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial diantara kelompok masyarakat. Dengan membaurnya kembali kelompok masyarakat yang mengalami konflik akan tercipta hidup rukun, damai, tentram, saling menghargai antar sesama tanpa membedakan ras, suku agama dan budaya.

Untuk mewujudkan pembauran masyarakat terkait dengan persoalan konflik, beberapa pijakan sebagai nilai dasar dalam menyelenggarakan program keserasian sosial yaitu: (1) Keseimbangan, keselarasan, keharmonisan, (2) mutualitas, (3) kesetaraan, (4) kesepakatan bersama, (5) inisiatif bersama dan (6) keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial pada Bab I pasal 3 yang didalamnya memuat tujuan penanganan konflik antara lain (1) menciptakan

kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera (2) memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan (3) meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (4) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, (5) memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Pemulihan pasca konflik bisa dilakukan melalui rehabilitasi baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan lingkungan, penguatan kebijakan publik dengan mendorong perbaikan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasis masyarakat, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya keamanan dan ketertiban.

KESIMPULAN

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Gambaran Implementasi Program Keserasian Sosial di DKI Jakarta secara fisik telah dilaksanakan sesuai dengan panduan yang ada. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di DKI Jakarta pembangunan sarana lingkungan, pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga, penghijauan, perbaikan sarana olah raga, pembuatan tugu, Pemda: *outbond*, palatihan dan modal usaha. Walaupun demikian secara fungsional belum menapai tujuan seara optimal, yaitu mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai, adil, selaras, harmonis dan seimbang di lokasi konflik. Hal ini disebabkan karena lokasi Program Keserasian sosial di daerah rawan konflik masih fokus pada kegiatan fisik.

Potensi program Keserasian Sosial dalam bentuk kelompok kearifan lokal (forum kewaspadaan, kelompok kesadaran masyarakat, forum anti kekerasan dan tawuran, dan lain-lain. Kelompok tersebut melaksanakan program masing-masing dan melaksanakan kegiatan secara sektoral.

Program keserasian sosial non fisik belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang dihadapi mereka belum mampu memetakan sumber masalah konflik dan kebutuhan akan tokoh atau panutan yang mampu menghentikan konflik. Program keserasian sosial sangat bermanfaat bagi daerah rawan konflik, karena dengan ditetapkannya daerah tersebut, maka dapat dikendalikan tidak lagi menjadi daerah rawan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002, kebijakan Publik, Pancur siwah, Jakarta
- Anonim, 2006, Panduan kegiatan penguatan keserasian sosial Korban Bencana Sosial, Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Jakarta.
- 2012, Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian sosial berbasis masyarakat Jakarta, Direktur perlindungan sosial Korban Bencana Alam, Jakarta.
- 2012, Indikator Keserasian Sosial, Direktorat perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Politik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail, 2011, Konflik umat beragama dan budaya local, Lubuk Agung, Bandung.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z Rubin, 2009, Teori Konflik Sosial, Pustaka Remaja, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarno,S & Roebyantho,H, 2013, Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam penanganan konflik Sosial, P3KS Press, Jakarta.
- Rita Sihabudin, 2001, Bara dalam Sekam; Identifikasi Akar Masalah Dan Solusi Atas Konflik-Konflik Lokal, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer. Kencana: Jakarta.
- Yadiman H & Daniel R.A., 2013, Konflik Sosial dan Anarkhisme, Andi Offset, Yogyakarta.
- <http://raipeza24.blogspot.com/2010/11/makalah-definisi-teori-penyebab-akibat.html>
- <http://psychochanholic.blogspot.com/2008/03/teori-teori-konflik.html>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik (diakses pada 18 Oktober 2011)